



## ABSTRAK

**Judul** : Implementasi Kebijakan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan; Studi Tentang Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah (*The School Improvement Grants Program*) di Kabupaten Garut  
**Ditulis oleh** : Cecep Firmansyah (NIM 999553/UPI PPS Program Studi Administrasi Pendidikan/S2)

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan model manajemen pembiayaan pendidikan yang dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan *The School Improvement Grants Program* (SIGP), SIGP menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, karena merupakan model kreatif dan inovatif dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Secara konseptual SIGP menawarkan hal-hal yang baru, SIGP juga menunjukkan hasil yang sangat baik dalam memperbaiki bangunan sekolah. Namun disamping keberhasilan tersebut tidak luput juga dari berbagai persoalan yang sangat menarik untuk diselami.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang: (1) latarbelakang diberlakukannya kebijakan SIGP; (2) manajemen pembiayaan SIGP; (3) efektivitas kebijakan SIGP; (4) masalah dan cara mengatasi masalah dalam implementasi kebijakan SIGP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang didukung teknik wawancara dan studi dokumentasi dengan menggunakan alat pengumpul data pedoman wawancara dan pedoman penelusuran dokumentasi. Sampel yang dipilih adalah Komite Kabupaten dan Komite Sekolah.

Temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) kebijakan SIGP dilatarbelakangi oleh tanggung jawab pemerintah dalam merespon krisis ekonomi untuk membantu sekolah-sekolah miskin; (2) manajemen pembiayaan SIGP meliputi perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan SIGP menggunakan *top down planning* dan *bottom up planning* melalui penentuan dana *flat the grant* (model bantuan murni) dengan memperhatikan fleksibilitas dan didasarkan pada fakta-fakta serta data yang jelas, menggunakan pemikiran yang logis, dapat diperkirakan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi. Penggunaan dana SIGP mencakup kebutuhan konstruksi maupun non konstruksi melalui sistem *block grant* yang dikelola oleh komite sekolah yang mencerminkan sekolah menerapkan prinsip-prinsip MBS, memberdayakan partisipasi masyarakat, sangat efektif dan efisien, warga sekolah merasa memiliki sekolah, menggerakkan ekonomi masyarakat, tetjamannya transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dana bantuan SIGP dilakukan secara integratif oleh berbagai lembaga, sedangkan aspek pertanggungjawaban dinyatakan melalui laporan-laporan yang disusun oleh masing-masing pelaksana program pada semua tingkatan menyangkut pelaksanaan pembangunan fisik dan dananya dan laporan pertanggungjawaban keuangan; (3) efektivitas kebijakan SIGP telah terbukti sangat tinggi, sekolah dapat memanfaatkan bantuan secara efektif melalui pelimpahan wewenang pengambilan keputusan serta melalui koordinasi, program ini telah menawarkan sebuah model yang bisa dipakai (diadopsi) oleh proyek-proyek lain; (4) pada implementasi kebijakan SIGP terdapat permasalahan yang perlu dianalisa sehingga dapat ditemukan cara mengatasinya.